

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi
4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Bidang Cipta Karya
6. Bidang Tata Ruang
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan skala kota;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2. Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- b. Pengelolaan program administrasi
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pemberian dukungan di bidang kerumahtanggaan, humas, protokol, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum, penatausahaan barang milik daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi,

Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan keciptakarya;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan Keciaptakarya

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang keciptakarya.

Fungsi Seksi Perencanaan Keciaptakarya adalah :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang keciptakarya dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang keciptakarya;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang keciptakarya; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan-bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

Fungsi Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Bina Jasa Konstruksi

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Fungsi Seksi Bina Jasa konstruksi, adalah :

- a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
- c. penyusunan profil jasa konstruksi;
- d. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

1) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala kota.

Fungsi Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala kota.

Fungsi Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Fungsi Seksi Terminal dan Perparkiran, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1) Seksi Pembangunan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan

Seksi Pembangunan Mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pembangunan keciptakaryaan skala kota;
- b. pelaksanaan program pembangunan keciptakaryaan;
- c. pembinaan perizinan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah kota.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- c. penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, Kampung Improvement Program (KIP) dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- b. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

6. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1) Seksi Pertanahan dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. pemrosesan penerbitan Advice Planning dan rekomendasi perizinan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2) Seksi Tata Bangunan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program tata bangunan skala kota;
- b. pelaksanaan program tata bangunan skala kota;
- c. pemeriksaan persyaratan teknis IMB;
- d. pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawasan Bangunan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mengawasi struktur bangunan

masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspek Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
5. Tingginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.
6. Sistem informasi yang terus berkembang.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan OPD Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
3. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal.
4. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan.
5. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang
6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan.
7. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

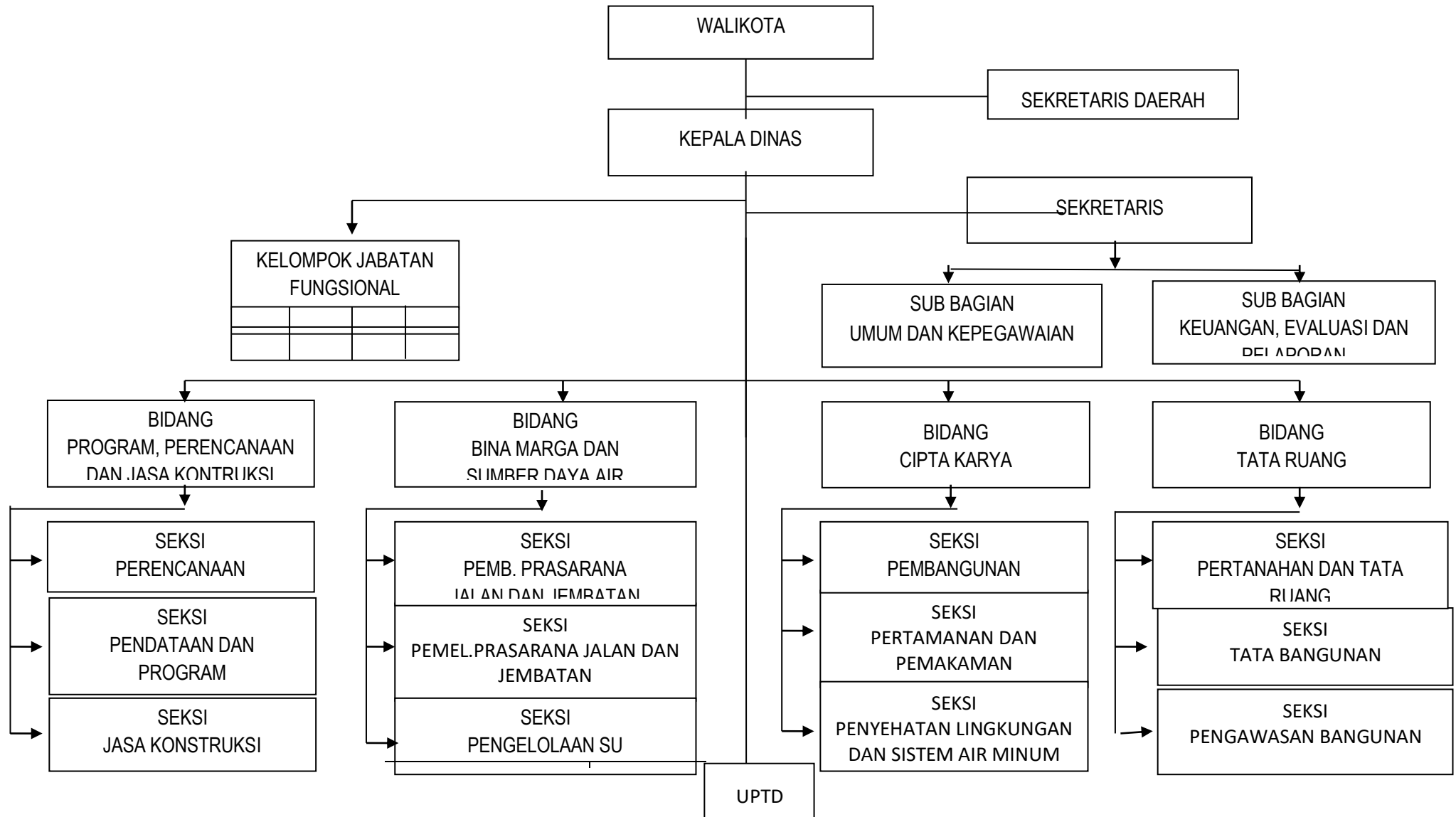
Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dalam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah PNS/CPNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang
Tahun 2019

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS	27	23	50	43,47
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	38	27	65	56,52
	Jumlah	65	50	115	100

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	1	-	1	2
3	SLTA	10	-	10	20
4	Muda/D3 Sarjana	7	3	10	10
5	Pasca Sarjana	16	9	25	50
6		2	1	5	6
	Jumlah	37	13	50	100 %

Secara riil jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 50 orang ASN.

Tabel. 1.3

**Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
Panjang menurut golongan Tahun 2019**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	Golongan I	1	-	1	2
	Golongan II	14	1	15	30
	Golongan III	20	9	29	58
	Golongan IV	3	2	5	10
	Jumlah	38	12	50	100

Pada Tabel. 1.3 dapat dilihat bahwa Pegawai dengan golongan IV berjumlah 5 (Lima) orang. Pegawai dengan golongan III berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Sedangkan pegawai dengan golongan II berjumlah 15 (Lima Belas) orang, dan Golongan I berjumlah 1 (Satu) Orang.

A. MISI

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senada dengan Misi 1 Kota Padang Panjang adalah Ekonomi :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis
Pembangunan Berkelanjutan”**

B. TUJUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yakni :

“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan”

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

- 1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar**
- 2. Meningkatnya Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang**

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Untuk Kejayaan Kota Padangpanjang yang bermarwah dan Bermartabat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya a Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar	a. Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik b. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak c. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
			Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2019	
1	2	4	6
1	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	65,14 %	Rata-rata Pembangunan Jalan,Irigasi,drainase,Trotoar,Bangunan Gedung RTH, sarana sanitasi,PJU yang dibangun atau direhab/ Rata-rata Jalan,Irigasi,drainase,Trotoar,Bangunan Gedung,RTH,sarana Sanitasi,PJU yang direncanakanx100%
2	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	79%	Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak / Total jumlah rumah di kota padang panjang x100%
3	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	100%	Total jumlah rumah yang mempunyai air minum / jumlah rumah di kota padang panjang x 100%
4	Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	2,7	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2019	
1	2	4	6
1	Persentase ketersediaan Sarana Publik	20%	Jumlah sarana publik yang dibangun/jumlah kebutuhan sarana publik x 100%
2	Persentase Trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	17%	Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/panjang keseluruhan trotoar x 100%
3	Persentase Jalan dalam kondisi baik	90,50%	Panjang jalan dalam kondisi baik/total keseluruhan panjang jalan x 100 %
4	Persentase Penerangan jalan umum	71%	Jumlah pemasangan PJU/Total Kebutuhan Pemasangan PJU x 100%
5	Persentase RTH Publik	2,6%	Luasan RTH publik yang tersedia/Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia x 100%
6	Rasio Bangunan BerIMB	0,766	Jumlah bangunan ber IMB/Jumlah Bangunan

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar	a. Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik b. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak c. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	65,14% 79% 100%
2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	2,7

a. Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Program dan Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi	%
V	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik		7.009.177.170	5.800.248.400	82,75
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum	600.000.000	366.067.500	61,01
	2	Pembangunan sarana dan Prasarana Ibadah	2.317.880.000	1.890.734.930	81,57
	3	Pembangunan sarana dan Prasarana Pasar	3.741.297.170	3.543.445.970	94,71
	4	Pembangunan Retaining Wall	-	-	
	5	Penyusunan DED Gedung Parkir	350.000.000	-	0,00
VI	Pembinaan Jasa Konstruksi		300.865.000	202.946.501	67,45
	1	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	14.550.000	6.785.000	46,63

	2	Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas konstruksi	132.340.000	91.406.326	69,07
	3	Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	153.975.000	104.755.175	68,03
VII	Pembangunan Jalan dan Jembatan		13.934.675.074	12.250.716.316	87,92
	1	Pembangunan Jalan	8.759.550.000	8.271.165.313	94,42
	2	Pembangunan Jalan Dalam Kota (DAK Infrastruktur Jalan)(utang 2018)	5.151.774.274	3.956.200.202	76,79
	3	Pembangunan Jalan (Utang 2018)	19.550.800	19.550.800	100,00
	4	Dana Operasional Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Utang 2018)	3.800.000	3.800.000	100,00
VIII	Pembangunan Dan Pemeliharaan Trotoar		3.507.508.499	3.110.274.058	88,67
	1	Pembuatan DED Pendestrian	203.386.000	130.575.075	64,20
	2	Pembangunan Trotoar	2.294.956.271	2.092.342.671	91,17
	3	Rehabilitasi Trotoar	1.009.166.228	887.356.312	87,93
IX	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		400.000.000	305.989.100	76,50
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Gorong-Gorong	400.000.000	305.989.100	76,50
X	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		10.143.212.400	8.629.660.288	85,08
	1	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	584.500.000	553.483.298	94,69
	2	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	628.650.000	556.871.000	88,58
	3	Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Periodik)	291.500.000	134.502.429	46,14
	4	Dana Operasional Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Utang 2018)	9.357.400	9.357.400	100,00
	5	Kajian Potensi Pelebaran Jalan	100.000.000	92.500.000	92,50
	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar	400.000.000	278.122.000	69,53
	7	DAK Bidang Jalan	8.129.205.000	7.004.824.161	86,17
XI	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Penggairan Lainnya		2.170.415.400	2.031.404.646	93,60
	1	Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.181.000.000	1.144.373.725	96,90
	2	Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi	192.600.000	122.976.490	63,85
	3	DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	791.061.000	758.300.031	95,86
	4	Dana Penunjang Operasional DAK Infrastruktur Irigasi (Utang 2018)	5.754.400	5.754.400	100,00
XII	Pengembangan , Pengelolaan Dan Konservasi Sungai		936.455.310	835.088.155	89,18
	1	Pembangunan Pengaman Sungai	704.150.000	646.942.900	91,88
	2	Bangunan Pengamanan Sungai (Utang 2018)	232.305.310	188.145.255	80,99
XIII	Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		2.346.037.200	2.241.756.050	95,56

	1	Penambahan jaringan Tiang lampu Jalan Dalam Kota	1.723.750.000	1.681.221.200	97,53
	2	Pemeliharaan Jaringan, Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota	622.287.200	560.534.850	90,08
XIV	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		3.681.531.659	3.304.442.954	89,76
	1	Penataan RTH	605.440.000	555.412.104	91,74
	2	Pemeliharaan RTH	2.076.324.000	1.897.716.124	91,40
	3	Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak	230.350.000	228.851.000	99,35
	4	Revisi Masterplan RTH	230.004.000	186.053.175	80,89
	5	Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Taman Kota	446.311.100	343.307.992	76,92
	6	Pembangunan ruang Terpadu Ramah anak (RPTRA) (Utang 2018)	93.102.559	93.102.559	100,00
XV	Bangunan Air Kotor Perkotaan		3.373.500.000	3.006.222.000	89,11
	1	Bangunan Air Kotor	3.373.500.000	3.006.222.000	89,11
XVI	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		3.595.452.438	2.890.024.788	80,38
	1	Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)	150.000.000	87.306.260	58,20
	2	DAK Infrastruktur Air Bersih	1.195.452.438	1.086.718.528	90,90
	3	DAK Sanitasi Air Limbah	2.250.000.000	1.716.000.000	76,27
XVII	Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		419.098.800	287.653.866	68,64
	1	Pembinaan Fasilitas TIM Ahli Bangunan Gedung	50.700.000	19.075.500	37,62
	2	Rapat Koordinasi Perencanaan Tata ruang	18.650.000	6.182.563	33,15
	3	Revisi Perda RTRW	41.000.000	31.206.190	76,11
	4	Survey dan Pemetaan	19.999.800	12.238.688	61,19
	5	Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat Yang Terkena Fasum	50.000.000	1.754.000	3,51
	6	Pematokan Tanah yang Telah Diserahkan Masyarakat Untuk Fasum	49.000.000	47.585.000	97,11
	7	Entry Plotting Data Advice Planing IMB	170.000.000	152.111.800	89,48
	8	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	19.749.000	17.500.125	88,61
JUMLAH			51.817.928.950	44.896.427.121	86,64

G. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 adalah mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan .

Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 2.5
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan dan jembatan	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan 2.Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik
		2.Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung	1.Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.mengembangkan trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas 3.meningkatnya RTH yang berbasis digital
		3.Melaksanakan updating kondisi jalan dan	1.pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data

		jembatan	jalan dan jembatan
		4.melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik	1.meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik
		5.meningkatnya kinerja layanan irigasi	1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi 2.meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi an bangunan perairan lainnya
		6.Meningkatkan kapasitas pengelola SDA	1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
		7.Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata	1.meningkatnya penataan sungai 2.meningkatnya kualitas pengeolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
		8.meningkatnya cakupan layanan air minum aman dan sistem perpipaan	11.penambahan jaringan air minum 12.mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum
		9.meningkatnya pelayanan jaringan drainase kawasan perkotaan	1.peningkatan penyediaan jaringan drainase kota 2.meningkatnya persentase jalan kota

			yang memiliki drainase
		10.meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan	1.Penataan bangunan dan lingkungan 2.meningkatnya ketersediaan fasilitas umum perkotaan
		11.meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi
		12.meningkatnya kualitas layanan perizinan jasa konstruksi	1.tersedianya layanan IUJK yang sesuai SOP
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata kelola	1.Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang	1.Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
		2.melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada	1.pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang 2.meningkatnya kepatuhan pembanguann sesuai dokumen tata ruang
		3.menerbitkan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan	1.penerbitan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan
		4.menerbitkan rekomendasi izin	1.penerbitan rekomendasi IMB

		pemanfaatan ruang	2.Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang 3.Meningkatnya pembangunan bangunan gedung sesuai dengan IMB
		5.melakukan penataan bangunan dan lingkungan	1.pembinaan tata bangunan dan lingkungan.
		6.melakukan pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan ruang	1.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		7.meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang	1.peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara negra
		8.menyediakan sistem informasi penataan ruang	1.penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS
		9.menyediakan data base aset tanah	1.penyediaan data base tanah aset Pemko
		10.melaksanakan sertifikasi tanah asset	1.pelaksanaan sertifikasi tanah aset pemko

H. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2019 telah dapat melaksanakan 17 (tujuh belas) program dengan 65 (65 kegiatan) kegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal
- ◆ Program Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan baik fisik maupun non fisik.
- ◆ Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.
- ◆ Program Sasaran Daerah adalah program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung capaian sasaran kinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) periode 2018-2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Tahun 2019 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Capaian Indikator Kinerja mengacu RPJMD 2018-2023

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2019 dengan realiasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi 2018
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana publik	Persentase ketersediaan Sarana Publik	20%	16%	80%	
2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotar jalur utama yang ramah disabilitas	17%	17%	100%	
3	Program Pembangunan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	90,50%	85,60%	95%	
4	Program penerangan jalan umum	Persentase Penerangan jalan umum	71%	90,52%	127,49%	
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase RTH Publik	2,6%	4,20%	161,53%	
6	Program perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio Bangunan BerIMB	0,766	0.44	57%	

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun kedua ini menunjukkan angka capaian yang cukup baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2019 hampir mencapai target kinerja yang telah ditentukan kecuali pada rasio bangunan berIMB dari target 0.776 dan realisasi 0,44 menunjukkan capaian 57% hal ini di sebabkan :

1. Fungsi kawasan bangunan tidak cocok karena banyak bangunan yang dibangun tidak di daerah pemukiman.
2. Standart retribusi IMB cukup mahal sehingga menyebabkan masyarakat yang mengurus IMB tidak mau membayar retribusi.
3. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengurus IMB dan mendirikan bangunan pada daerah pemukiman.
4. Data bangunan ber IMB by name by adress yang ditemukan sampai dengan Tahun 2019 adalah 4038 unit, hal ini disebabkan oleh adanya dokumen IMB yang hilang karena pindah pindah kantor dan pindah ruangan,serta buku agenda penomoran IMB yang hilang.

Adapun data pendukung pencapaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Data Dasar Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Tahun 2019**

No	Program	Indikator kinerja	Target	Pembilang/ Penyebut	Realisasi 2019	Capaian
1.	Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Persentase ketersediaan sarana publik	20%	4 unit x 100% 24	16%	80%
2.	Program Perencanaan dan pembinaan jasa konstruksi	Proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	27%	$\frac{192}{399} \times 100\%$	48,12%	177%
3.	Program Pembangunan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	90,50 %	$\frac{80.853 \text{ km}}{94.456} \times 100\%$	85,60%	94%
4.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	17%	$\frac{402 \text{ m}}{5727,7} \times 100\% +$ DED Kawasan pasar 7,5% +DED M.Yamin 2,5% 5727,7	17%	100%
5.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik	88%	$\frac{119293,25}{123919} \times 100\%$	96,27%	109,39%
6.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dalam kota	1	$\frac{4108 \text{ m}}{8911} \times 100\%$	46,10 %	46,10 %
7.	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	65%	$\frac{33015}{46500} \times 100\%$	71%	109,23%
8.	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	62%	$\frac{293}{265 \text{ m}} \times 100\%$	110%	177%
9.	Program penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan umum(pemasangan	71%	$\frac{1882}{2079} \times 100\%$	90,52%	127%

		PJU etiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota				
10	Program bangunan air kotor perkotaan	Panjang bangunan air kotor yang dibangun	2 km	$\frac{1,44225}{2} \text{ km} \times 100\%$	72%	72%
11	Program Pengembangankinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan pelayanan air limbah Cakupan air minum	79% 100%	$\frac{2}{2} \text{ unit} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \text{ unit} \times 100\%$	100% 100%	126% 100%
12	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota	2,6 %	$\frac{52,902 \text{ ha}}{1260,22} \times 100\%$	4,20%	161,53%
13.	Program perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio bangunan berIMB	0.776	$\frac{4043}{9178} \times 100\%$	0,44	57%

- Indikator kinerja persentase ketersediaan sarana publik pada program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik dari target 20% dengan realisasi kinerja 16% menunjukkan bahwasanya capaian kinerja dari target adalah 80% dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang telah direncanakan sehingga persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik tercapai. Dari 24 sarana publik yang harus tersedia bisa dipenuhi 4 sarana publik yaitu 1 lokasi pratasi atrilik pada bangun pasar, rehab kandang kuda bancah laweh (50 unit), 8 jumlah pintu replika nabawi pada Islamic Center, 1 unit pembuatan reserver air bersih pada Islamic Center.
- Indikator kinerja Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat pada Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi dari target 27% dengan realisasi kinerja 48% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 177% dengan terpenuhinya proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebanyak 192 orang dari 399 orang tenaga kerja konstruksi.
- Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik pada Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan dari target 90,50 % dan realisasi kinerja sebesar 85,60 sehingga capaian sebesar 94% dengan panjang jalan yang dalam kondisi baik 80,853 km dari 94,456 km yang ada di kota padang panjang.
- Indikator kinerja Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas pada Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar dari target 17 % dengan realisasi 17% dengan capaian 100% dengan terpenuhinya

Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas dengan panjang 402 m (7%) dari 5727,7 m panjang trotoar jalur utama, kinerja meningkat dengan DED kawasan pasar 7,5% dan DED jl.M.Yamin 2,5% .

- Indikator kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dari target 88% dengan realisasi 96,27% dengan capaian 109.39% dengan terpenuhinya 119293,25 km drainase yang dalam kondisi baik dari 123919 km panjang seluruh drainase kota padang panjang.
- Indikator kinerja Terpeliharanya jalan dalam kota pada Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan realisasi 46,10 % dengan rehabilitasi jalan 4108 m dan 8911 m jalan yang dipelihara.data tersebut menunjukkan bahwa jalan terpelihara dengan baik karena kerusakan dan rehabilitasi hanya 46,10%.
- Indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya dengan target 65% dan realisasi 71% dengan capaian 109,23 % dengan panjang irigasi yang dalam kondisi baik 33015 m dari 46500 m irigasi yang dipelihara.
- Indikator kinerja Persentase panjang sungai yang dikonservasi 293 meter dari 265 meter yang seharusnya dikonservasi sehingga ada kenaikan capaian sebesar 177% dikarenakan pengerjaan saluran sungai jl yulius usman 108 m dan SD maarif 100 m an gugukkeliling sebesar 85 m.
- Indikator kinerja Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota) pada Program Penerangan jalan Umum dari target 71% dengan realisasi 90,52% dengan capaian 127%, dengan terpenuhinya 1882 titik PJU di setiap 50 meter panjang jalan utama dan jalan lingkungan yang seharusnya yaitu 2079 titik.
- Indikator kinerja Panjang bangunan air kotor yang dibangun dari Program bangunan air kotor perkotaan dari target 2 km telah terealisasi 1,44225 km sehingga capaian realisasi bangunan air kotor mencapai 72% .

- Indikator kinerja Cakupan pelayanan air limbah pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan target 79% dan realisasi 100% dengan capaian 126% untuk sarana sanitasi air limbah dan 100% untuk sarana sanitasi air minum, data yang memenuhi angka ini adalah 2 unit yang memiliki sarana sanitasi air minum dan 2 unit sarana sanitasi air limbah.
- Indikator kinerja Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota pada Program pengelolaan ruang terbuka hijau dengan target 2,6% dan realisasi 4,20% dengan capaian 161,53% dengan data ruang terbuka hijau publik yang tersedia 52,902 Ha dari 1260,22 Ha Ruang terbuka hijau kota padang panjang.
- Indikator kinerja Rasio bangunan berIMB pada Program perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dari target 0.776 dan realisasi 0.44 dengan capaian 57%. Data yang mendukung adalah jumlah bangunan yang berIMB 4043 dari 9178 bangunan yang ada. Capaian 57 % ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 1. Fungsi kawasan bangunan tidak cocok karena banyak bangunan yang dibangun tidak di daerah pemukiman.
 2. Standart retribusi IMB cukup mahal sehingga menyebabkan masyarakat yang mengurus IMB tidak mau membayar retribusi.
 3. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengurus IMB dan mendirikan bangunan pada daerah pemukiman.
 4. Data bangunan ber IMB by name by adress yang ditemukan sampai dengan Tahun 2019 adalah 4038 unit, hal ini disebabkan oleh adanya dokumen IMB yang hilang karena pindah pindah kantor dan pindah ruangan,serta buku agenda penomoran IMB yang hilang.

3. Capaian indikator kinerja utama

Capaian kinerja indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018-2023 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang sesuai Standar	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Persen	65,14	67,56	103,72%
	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	Persen	79	48,73	62%
	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	Persen	100	74,71	75%
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Indeks	2,7	2,8	104%

Dapat dilihat dari tabel diatas adanya realisasi kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja tahun 2019.

➤ ***Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik***

Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik di Kota Padang Panjang tahun 2019 mengalami capaian sebesar 103,71% dari target persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik sebesar 65,17% dengan realisasi kinerja sebanyak 67,56 %. Persentase ini didapat dari rata rata pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dasar publik :

- a. Jalan dalam kondisi baik dengan panjang 80,853 km dari 94,456 km sehingga meningkat sebesar 85,60%
- b. Irigasi dalam kondisi baik dengan panjang 33015 m dari 46500 m sehingga kondisi baik sebesar 71%
- c. Drainase dalam kondisi baik dengan panjang 119293,25 km dari 123919 km sehingga kondisi baik sebesar 96,27%
- d. Trotoar disabilitas dalam kondisi baik dengan panjang 17%
- e. Luasan RTH yang memenuhi 12,52% dengan data 157,731 ha yang dari 1260,22 ha .
- f. Sarana sanitasi (air minum dan air limbah)yang telah dibangun 4 unit dari 4 unit yang direncanakan sehingga terlaksana 100%.
- g. PJU yang dalam kondisi baik 1882 titik dari 2079 titik sehingga tercapai 90,52%
- h. Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi ada 4 dari 24 sarana publik yang seharusnya dibangun dan direhabilitasi sehingga tercapai 16 %.

➤ ***Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak***

Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak terealisasi sebesar 48,73 % dari target tahun 2019 79% dengan Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak sebanyak 7553 kk dari seluruh jumlah rumah yang ada di kota padang panjang yakni 15499 kk, pada tahun 2019 sehingga mengalami capaian sebesar 62 %.

➤ ***Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak***

Target indikator ini pada tahun 2019 mengalami capaian sebesar 75% dari target persentase proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 100% dengan realisasi kinerja

74,71%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu 11580 kk dari 15499 kk yang ada di kota Padang Panjang.

➤ ***Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang***

Indeks penilaian ruang yang sesuai dengan tata ruang tahun 2019 adalah sebesar 2,8 dari target tahun 2019 yaitu sebesar 2,7. Dari data tersebut terlihat kenaikan sebesar 0,1 dan capaian kinerja sebesar 104%. Data ini dalam bentuk angka : Pemanfaatan ruang yang sesuai sebesar 2832,125 Km²/ 2914,216 Km² pemanfaatan ruang keseluruhan x 100% = 97,18 % = 2,8 (indeks)

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 sebesar Rp. 48.887.314.431,19,- (86,65%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 56.416.252.699,85,-, sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan sasaran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 51.817.928.850,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 44.780.229.907,72,- atau sebesar 86,42%, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	7.009.177.170,00	5.800.248.400,00	82,75%
		Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi	300.865.000,00	202.946.500,00	67,45%
		Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	13.934.675.074,00	12.250.716.315,87	87,92%
		Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	3.507.508.499,00	3.110.274.057,31	88,67%
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	400.000.000,00	305.989.100,00	76,50%

		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.143.212.400,00	8.629.660.287,80	85,08%
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	2.170.415.400,00	2.031.404.645,99	93,60%
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	936.455.310	835.088.155	89,18%
		Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.346.037.200,00	2.241.756.050,00	95,56%
	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	Program Bangunan Air Kotor Perkotaan	3.373.500.000,00	2.890.024.788,00	85,67%
	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			80,38%
		3.595.452.438,00	2.890.024.788,00		
Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.681.531.559,00	3.304.442.953,75	89,76%
		Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	419.098.800,00	287.653.866,00	68,64%
JUMLAH			51.817.928.850,00	44.780.229.907,72	86,42%

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa target program indikator kinerja utama terealisasi dengan capaian bernilai baik, hal ini membuktikan bahwasanya target tercapai untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang serta misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang lebih lanjut diuraikan pada realisasi kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tabel 3.6

2. Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah

Anggaran program sasaran daerah yang menjadi salah satu indikator penghitungan kualitas infrastruktur berkelanjutan di Kota Padang Panjang Panjang,

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah
Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu	Realisasi	

Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	7.009.177.170,00	5.800.248.400,00	82,75%
		Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	13.934.675.074,00	12.250.716.315,87	87,92%
		Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	3.507.508.499,00	3.110.274.057,31	88,67%
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.143.212.400,00	8.629.660.287,80	85,08%
		Program penerangan jalan umum	2.346.037.200,00	2.241.756.050,00	95,56%
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.681.531.559,00	3.304.442.953,75	89,76%
		Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	419.098.800,00	287.653.866,00	68,64%
JUMLAH			41.041.240.702,00	35.624.751.930,73	86,80%

Program yang mendukung sasaran daerah pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 7 program anggaran sebesar Rp. 42.041.240.702,- terealisasi sebesar Rp. 35.624.751.930,73,- (86,80%).

3. Realisasi Anggaran Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan anggaran yang menjadi dasar perjanjian kinerja Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan target anggara sebesar Rp. 51.817.928.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.896.427.121,- atau (86,64%), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Nama Program dan Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi	%
V	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik		7.009.177.170	5.800.248.400	82,75
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum	600.000.000	366.067.500	61,01
	2	Pembangunan sarana dan Prasarana Ibadah	2.317.880.000	1.890.734.930	81,57
	3	Pembangunan sarana dan Prasarana Pasar	3.741.297.170	3.543.445.970	94,71

	4	Pembangunan Retaining Wall	-	-	
	5	Penyusunan DED Gedung Parkir	350.000.000	-	0,00
VI	Pembinaan Jasa Konstruksi		300.865.000	202.946.501	67,45
	1	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	14.550.000	6.785.000	46,63
	2	Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas konstruksi	132.340.000	91.406.326	69,07
	3	Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	153.975.000	104.755.175	68,03
VII	Pembangunan Jalan dan Jembatan		13.934.675.074	12.250.716.316	87,92
	1	Pembangunan Jalan	8.759.550.000	8.271.165.313	94,42
	2	Pembangunan Jalan Dalam Kota (DAK Infrastruktur Jalan)(utang 2018)	5.151.774.274	3.956.200.202	76,79
	3	Pembangunan Jalan (Utang 2018)	19.550.800	19.550.800	100,00
	4	Dana Operasional Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Utang 2018)	3.800.000	3.800.000	100,00
VIII	Pembangunan Dan Pemeliharaan Trotoar		3.507.508.499	3.110.274.058	88,67
	1	Pembuatan DED Pendestrian	203.386.000	130.575.075	64,20
	2	Pembangunan Trotoar	2.294.956.271	2.092.342.671	91,17
	3	Rehabilitasi Trotoar	1.009.166.228	887.356.312	87,93
IX	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		400.000.000	305.989.100	76,50
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Gorong-Gorong	400.000.000	305.989.100	76,50
X	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		10.143.212.400	8.629.660.288	85,08
	1	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	584.500.000	553.483.298	94,69
	2	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	628.650.000	556.871.000	88,58
	3	Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Periodik)	291.500.000	134.502.429	46,14
	4	Dana Operasional Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Utang 2018)	9.357.400	9.357.400	100,00
	5	Kajian Potensi Pelebaran Jalan	100.000.000	92.500.000	92,50
	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar	400.000.000	278.122.000	69,53
	7	DAK Bidang Jalan	8.129.205.000	7.004.824.161	86,17
XI	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Penggairan Lainnya		2.170.415.400	2.031.404.646	93,60
	1	Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.181.000.000	1.144.373.725	96,90
	2	Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi	192.600.000	122.976.490	63,85
	3	DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	791.061.000	758.300.031	95,86
	4	Dana Penunjang Operasional DAK Infrastruktur Irigasi (Utang 2018)	5.754.400	5.754.400	100,00
XII	Pengembangan , Pengelolaan Dan Konservasi Sungai		936.455.310	835.088.155	89,18
	1	Pembangunan Pengaman Sungai	704.150.000	646.942.900	91,88
	2	Bangunan Pengamanan Sungai (Utang 2018)	232.305.310	188.145.255	80,99

XIII	Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		2.346.037.200	2.241.756.050	95,56
	1	Penambahan jaringan Tiang lampu Jalan Dalam Kota	1.723.750.000	1.681.221.200	97,53
	2	Pemeliharaan Jaringan, Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota	622.287.200	560.534.850	90,08
XIV	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		3.681.531.659	3.304.442.954	89,76
	1	Penataan RTH	605.440.000	555.412.104	91,74
	2	Pemeliharaan RTH	2.076.324.000	1.897.716.124	91,40
	3	Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak	230.350.000	228.851.000	99,35
	4	Revisi Masterplan RTH	230.004.000	186.053.175	80,89
	5	Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Taman Kota	446.311.100	343.307.992	76,92
	6	Pembangunan ruang Terpadu Ramah anak (RPTRA) (Utang 2018)	93.102.559	93.102.559	100,00
XV	Bangunan Air Kotor Perkotaan		3.373.500.000	3.006.222.000	89,11
	1	Bangunan Air Kotor	3.373.500.000	3.006.222.000	89,11
XVI	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		3.595.452.438	2.890.024.788	80,38
	1	Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)	150.000.000	87.306.260	58,20
	2	DAK Infrastruktur Air Bersih	1.195.452.438	1.086.718.528	90,90
	3	DAK Sanitasi Air Limbah	2.250.000.000	1.716.000.000	76,27
XVII	Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		419.098.800	287.653.866	68,64
	1	Pembinaan Fasilitas TIM Ahli Bangunan Gedung	50.700.000	19.075.500	37,62
	2	Rapat Koordinasi Perencanaan Tata ruang	18.650.000	6.182.563	33,15
	3	Revisi Perda RTRW	41.000.000	31.206.190	76,11
	4	Survey dan Pemetaan	19.999.800	12.238.688	61,19
	5	Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat Yang Terkena Fasum	50.000.000	1.754.000	3,51
	6	Pematokan Tanah yang Telah Diserahkan Masyarakat Untuk Fasum	49.000.000	47.585.000	97,11
	7	Entry Plotting Data Advice Planing IMB	170.000.000	152.111.800	89,48
	8	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	19.749.000	17.500.125	88,61
JUMLAH			51.817.928.950	44.896.427.121	86,64

✓ Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik dengan anggaran sebesar Rp. 7.009.177.170,- terealisasi sebesar Rp. 5.800.248.400 (82,75%) dialokasikan untuk 5 kegiatan yaitu pemeliharaan

rutin/berkala prasarana umum, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pembangunan sarana prasarana pasar, pembanguna retaining wall dan penyusunan DED Gedung Parkir. 300.865.000

- ✓ Program Perencanaan dan pembinaan jasa konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 300.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.946.500,- (67,45%) dialokasikan untuk kegiatan rehab/pemeliharaan alat uji 10 unit dan rehab/pemeliharaan fasilitas keselamatan seperti ; rambu-rambu, halte, traffic light pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi, pembinaan kompetensi dan produktifitas konstruksi dan pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi.
- ✓ Program pembangunan, Rehabilitasi jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.934.675.074,- terealisasi sebesar Rp. 12.250.716.315,87,- (87,92) dialokasi untuk kegiatan pembangunan jalan, pembangunan jalan dalam kota (DAK infrastruktur jalan/utang 2018),pembangunan jalan (utang 2018), Dana Operasional Penunjang DAK infrastruktur Jalan (utang 2018).
- ✓ Program pembangunan dan pemeliharaan trotoar dengan anggaran sebesar Rp. 3.507.508.499,- terealisasi sebesar Rp. 3.110.274.057,31,- (88,67%) dialokasikan untuk kegiatan pembuatan DED pedestrian, Pembangunan Trotoar dan Rehabilitasi Trotoar.
- ✓ Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 305.989.100,- (76,50%) dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase gorong-gorong
- ✓ Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp10.143.212.400,- terealisasi sebesar Rp. 8.629.660.287,80,- (85,08%) dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota, Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota, Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Periodik), Dana Operasional Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Utang 2018), Kajian Potensi Pelebaran Jalan, Pemeliharaan Rutin Berkala TrotoarDAK Bidang Jalan.
- ✓ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Penggairan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp2.170.415.400,- terealisasi sebesar Rp.2.031.404.646,-(93,60%) dialokasikan untuk kegiatanRehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Penunjang DAK

Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan), Dana Penunjang Operasional DAK Infrastruktur Irigasi (Utang 2018).

- ✓ Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai dengan anggaran sebesar Rp936.455.310,- terealisasi sebesar Rp. 835.088.155,- (89,18%) dialokasikan untuk kegiatanPembangunan Pengaman Sungai dan Bangunan Pengamanan Sungai (Utang 2018).
- ✓ Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp2.346.037.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.241.756.050,-(95,56%) dialokasikan untuk kegiatanPenambahan jaringan Tiang lampu Jalan Dalam Kota dan kegitatan Pemeliharaan Jaringan, Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota.
- ✓ Program Bangunan Air Kotor Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp 3.373.500.000,-teralisasi sebesar Rp. 3.006.222.000,-(89,11%) dialokasikan untuk kegiatanBangunan Air Kotor.
- ✓ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp3.595.452.438,-teralisasi sebesar Rp. 2.890.024.788,-(80,38%) dialokasikan untuk kegiatanDana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah) , Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah), DAK Sanitasi Air Limbah.
- ✓ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar Rp 3.681.531.659,-teralisasi sebesar Rp. 3.304.442.954,-(89,76%) dialokasikan untuk kegiatanPenataan RTH, Pemeliharaan RTH, Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak, Revisi Masterplan RTH, Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Taman Kota.
- ✓ ProgramPerencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp419.098.800,-teralisasi sebesar Rp.287.653.866,-(68,64%) dialokasikan untuk kegiatanPembinaan Fasilitas TIM Ahli Bangunan Gedung, Rapat Koordinasi Perencanaan Tata ruang, Revisi Perda RTRW, Survey dan Pemetaan, Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat Yang Terkena Fasum, Pematokan Tanah yang Telah Diserahkan Masyarakat Untuk Fasum, Entry Ploting Data Advice Planing IMB, Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

4. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum

Realisasi anggaran program/kegiatan umum tahun 2019 sebesar Rp. 4.598.323.750,- dari target anggaran sebesar Rp. Rp.3.990.887.310,- atau 86,79 %, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Nama Program dan Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.336.948.750	3.791.269.467	87,42
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.270.000	3.270.000	100,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.914.200.000	2.553.986.441	87,64
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	595.017.500	492.451.766	82,76
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	193.952.000	145.022.251	74,77
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.930.750	27.448.500	74,32
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.989.900	36.075.700	76,77
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.413.600	6.370.000	85,92
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.550.000	11.342.100	58,02
	10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrai/Teknis Kantor	38.625.000	34.351.653	88,94
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	481.000.000	480.951.056	99,99
II	Program Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		88.175.000	75.752.300	85,91
	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	74.000.000	66.023.700	89,22
	2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	14.175.000	9.728.600	68,63
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		106.000.000	84.287.393	79,52
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	106.000.000	84.287.393	79,52
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		67.200.000	39.578.150	58,90
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	500.000	500.000	100,00
	2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat daerah	1.690.000	1.689.800	99,99
	3	Penyusunan Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.010.000	37.388.350	57,51
JUMLAH			4.598.323.750	3.990.887.310	86,79

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai instansi teknis sektor pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Analisis indikator sasaran :

➤ ***Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik***

Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik di Kota Padang Panjang tahun 2019 mengalami capaian sebesar 103,71% dari target persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik sebesar 65,17% dengan realisasi kinerja sebanyak 67,56 %. Persentase ini didapat dari rata rata pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dasar publik :

- i. Jalan dalam kondisi baik dengan panjang 80,853 km dari 94,456 km sehingga meningkat sebesar 85,60%
- j. Irigasi dalam kondisi baik dengan panjang 33015 m dari 46500 m sehingga kondisi baik sebesar 71%
- k. Drainase dalam kondisi baik dengan panjang 119293,25 km dari 123919 km sehingga kondisi baik sebesar 96,27%
- l. Trotoar disabilitas dalam kondisi baik dengan panjang 17%
- m. Luasan RTH yang memenuhi 12,52% dengan data 157,731 ha yang dari 1260,22 ha .
- n. Sarana sanitasi (air minum dan air limbah)yang telah dibangun 4 unit dari 4 unit yang direncanakan sehingga terlaksana 100%.
- o. PJU yang dalam kondisi baik 1882 titik dari 2079 titik sehingga tercapai 90,52%

- p. Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi ada 4 dari 24 sarana publik yang seharusnya dibangun dan direhabilitasi sehingga tercapai 16 %.

Analisis : dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran memiliki kenaikan dan capaian lebih dari 100 % pada Tahun 2019. Target kinerja yang semula 65,17 % dan realisasi kinerja 67,56%. Hal ini berarti DPUPR berhasil mencapai target dan melampaui target yang semula 65,17%. Keberhasilan ini didukung dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang meliputi jalan, Irigasi, trotoar, drainase, sarana sanitasi, PJU, bangunan gedung dan luasan RTH yang cukup terpenuhi dan dalam kondisi baik pada Tahun 2019.

➤ ***Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak***

Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak terealisasi sebesar 48,73 % dari target tahun 2019 79% dengan Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak sebanyak 7553 kk dari seluruh jumlah rumah yang ada dikota padang panjang yakni 15499 kk, pada tahun 2019 sehingga mengalami capaian sebesar 62 %.

Analisis :

Rendahnya realisasi capaian rumah tinggal bersanitasi layak disebabkan oleh meningkatnya jumlah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019. Data tersebut bersumber dari dokumen RP3KP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebanyak 15499 kk . Namun Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jumlah Rumah Tangga Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebanyak 12552 kk. Jika menggunakan data BPS tersebut maka persentase rumah tinggal dengan sanitasi layak sebesar : $7553/12552 = 60\%$ dengan capaian target sebesar 75,95 %.

➤ ***Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak***

Target indikator ini pada tahun 2019 mengalami capaian sebesar 75% dari target persentase proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 100% dengan realisasi kinerja

74,71%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu 11580 kk dari 15499 kk yang ada di kota Padang Panjang.

Analisis :

Tidak tercapainya target Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak disebabkan oleh meningkatnya jumlah rumah tangga di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019. Data tersebut bersumber dari dokumen RP3KP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (15499 kk). Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jumlah Rumah Tangga Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebanyak 12552 kk. Jika menggunakan data BPS tersebut maka Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan sebesar $11580/12552 = 92,25\%$.

➤ ***Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang***

Indeks penilaian ruang yang sesuai dengan tata ruang tahun 2019 adalah sebesar 2,8 dari target tahun 2019 yaitu sebesar 2,7. Dari data tersebut terlihat kenaikan sebesar 0,1 dan capaian kinerja sebesar 104%. Data ini dalam bentuk angka : Pemanfaatan ruang yang sesuai sebesar 2832,125 Km²/ 2914,216 Km² pemanfaatan ruang keseluruhan x 100% = 97,18 % = 2,8 (indeks)

Analisis :

Dengan demikian DPUPR berhasil dalam indikator sasaran strategis meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang memiliki capaian 104% melebihi dari target. Dengan realisasi indeks 2,8 dari target awal 2,7.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan

yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat baik dalam perencanaan partisipatif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2019 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
3. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal.
4. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan.
5. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang
6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan.
7. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dalam proses perencanaan.

3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.

Padang Panjang, Januari 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

WELDA YUSAR.ST.MT
NIP.19720810 199903 2 008

